

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak buruh merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh negara melalui konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri hak buruh telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlindungan hak pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan mereka.<sup>1</sup> Namun, fakta yang ada justru memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak buruh dan pekerja. Regulasi terkait ketenagakerjaan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Lemahnya posisi buruh dan absennya kehadiran pemerintah di pihak buruh membuat perlunya kehadiran kelompok buruh yang terorganisir. Oleh karena itu, serikat buruh hadir sebagai kelompok terorganisir yang berpihak pada kepentingan buruh.

Serikat buruh sudah menjadi wadah perkumpulan bagi para buruh untuk menyatukan kekuatan dan memulai gerakan. Meskipun gerakan buruh sendiri pada dasarnya adalah suatu ekspresi perlawanan dari kaum buruh untuk mendapatkan haknya, seringkali gerakan buruh mendapatkan stigma dari masyarakat. Momen penting seperti *May Day* misalnya, dilihat seperti acara rutin gerakan buruh yang menuntut upah dan kondisi kerja.<sup>2</sup> Stigma-

---

<sup>1</sup> Draft Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

<sup>2</sup> Dodi Faedlulloh, 2019. "Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi". Jurnal Politica Vol. 10 No. 2, Hal. 169.

stigma tersebut salah satunya terlahir dari sinisme segelintir media massa terhadap gerakan buruh.<sup>3</sup> Seperti halnya yang dimuat dalam tulisan Hasanudin Abdurakhman berjudul “Perjuangan Buruh Kok Minta Naik Upah Melulu” yang diunggah pada laman Mojok.co. Penulis memaparkan bahwa gerakan buruh hanya berkutik pada isu populer yang dipaksakan seperti upah dan penghapusan sistem kontrak dan tidak memiliki orientasi pada hal-hal substansial lainnya seperti peningkatan kapabilitas pekerja.<sup>4</sup> Narasi-narasi seperti itu membentuk citra gerakan buruh seolah-olah hanya berorientasi pada kenaikan upah. Hal ini menyebabkan hakikat gerakan serta agenda penting lainnya yang diperjuangkan kaum buruh menjadi tertimbun.<sup>5</sup> Padahal isu non-materialisme juga mungkin diperjuangkan dalam realitas buruh industri di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satu fakta empiris dari perjuangan buruh yang tidak hanya berkisar pada upah adalah isu-isu yang diperjuangkan oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR).

F-SEDAR merupakan salah satu organisasi buruh yang didirikan pada awal Oktober 2015 oleh para aktivis dan buruh yang bekerja di komunitas buruh Solidaritas.net dalam bentuk komite persiapan.<sup>7</sup> F-SEDAR mengorganisir beberapa serikat buruh dan kemudian memperjuangkan berbagai isu terkait ketenagakerjaan dan non-ketenagakerjaan. Salah satu isu non-ketenagakerjaan atau non-materialisme yang diperjuangkan F-SEDAR tercantum dalam program perjuangan F-SEDAR, yaitu penentangan terhadap MOU TNI/POLRI.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> TURC, “*MEDIA, GERAKAN BURUH, DAN KESADARAN KELAS YANG USANG*”, <https://turc.or.id/2019/08/09/media-gerakan-buruh-dan-kesadaran-kelas-yang-usang/> (diakses pada 6 Januari 2021)

<sup>4</sup> Hasanudin Abdurakhman, “*Perjuangan Buruh Kok Minta Upah Melulu*”, <https://mojok.co/esai/perjuangan-buruh-kok-minta-naik-upah-melulu/> (diakses pada 6 Januari 2021)

<sup>5</sup> *Loc.cit.*, TURC.

<sup>6</sup> Nicolaas Warouw, 2005. “*Pekerja Industri Indonesia, Gerakan Buruh, dan New Social Movement: Merajut Sebuah Kemungkinan*”. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 10 No. 2, Hal. 15.

<sup>7</sup> SEDAR, “*Tentang FSEDAR*”, <https://fsedar.org/tentang-fsedar/> (diakses pada 30 Maret 2020)

<sup>8</sup> SEDAR, “*Program*”, <https://fsedar.org/program/> (diakses pada 30 Maret 2020)

Sedangkan isu-isu ketenagakerjaan yang diupayakan F-SEDAR secara garis besar di antaranya adalah pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015, penghapusan sistem kerja *outsourcing*, penghapusan persyaratan kerja yang diskriminatif, tuntutan atas hak maternitas buruh perempuan, dan revisi regulasi perburuhan agar menjadi pro-buruh.<sup>9</sup> Dilansir dari laman fsedar.org, salah satu contoh kasus yang belakangan ini diperjuangkan F-SEDAR adalah pelanggaran hak buruh oleh PT. Alpen Food Industry yang mengakibatkan permasalahan hubungan industrial berkepanjangan antara pekerja dengan pengusaha. Adapun rentetan pelanggaran hak yang dilakukan oleh PT. AFI telah dirangkum sebagai berikut.

a. Penurunan upah

Sejak tahun 2017 terjadi penurunan upah dari upah sektor II menjadi upah minimum kabupaten (UMK). Oleh karena itu, para buruh mulai memperjuangkan agar perusahaan memberikan tambahan upah. Namun, kenaikan gaji justru hanya dirasakan oleh pekerja kelas menengah disaat sebagian besar buruh bekerja dibagian produksi. Sementara itu struktur dan skala upah yang diterapkan tidak memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

b. Mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak proporsional

Selain penurunan upah, para buruh juga mendapatkan sanksi berupa surat peringatan dengan terlalu mudah tanpa didahului dengan teguran lisan. Bahkan sejak tahun 2018 buruh mengalami berbagai mutasi dan demosi yang seringkali dilakukan secara sepihak. Demosi juga diterima oleh buruh yang mengikuti aksi mogok kerja sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. Pada Desember 2019, mutasi diberikan kepada 71

---

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

orang buruh dan berakhir dengan pengenaan SP 3 dan selanjutnya di PHK. Para buruh pun kemudian digantikan oleh buruh *outsourcing* yang didatangkan dari Jawa Timur.

c. Prosedur pengambilan cuti sakit, izin, dan cuti haid yang rumit

Perubahan prosedur pengambilan cuti pada tahun 2018 membuat pekerja semakin kesulitan untuk mendapatkan hak cutinya. Prosedur pengambilan cuti harus melalui enam tahapan, dimulai dari pengambilan dan penandatanganan formulir cuti oleh buruh, pengajuan tanda tangan leader, supervisor, manajer produksi atau asisten/penerjemahnya dan HRD yang kemudian kembali ke office untuk penyerahan formulir. Prosedur ini dianggap menyulitkan karena kerap kali orang yang harus dimintai tanda tangan berada di lokasi yang berbeda, belum lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat meminta tanda tangan. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan buruh yang sedang dalam kondisi sakit. Selain itu, surat keterangan dokter sangat dibatasi oleh fasilitas kesehatan. Pekerja yang sakit diberikan surat keterangan berobat yang mengartikan bahwa pekerja dianggap kuat untuk melanjutkan pekerjaannya.

d. Pengabaian hak buruh perempuan

Permasalahan kondisi buruh perempuan sangat menonjol di sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020 dimana terjadi 20 kasus keguguran yang dialami oleh para buruh perempuan. Hal ini terjadi karena buruh perempuan yang sedang hamil masih dikenakan sistem kerja sif. Sistem kerja sif terdiri dari sif 1 (waktu kerja pukul 07.00 pagi hingga 15.00 sore), sif 2 (waktu kerja pukul 15.00 hingga 23.00 malam), dan sif 3 (waktu kerja pukul 23.00 hingga 07.00 pagi). Dari pembagian waktu kerja tersebut, buruh hamil kerap dipekerjakan pada sif 3. Buruh hamil juga dibebani target produksi

dengan kondisi lingkungan kerja bersuhu dingin dan terpapar amoniak sehingga tidak baik untuk kesehatan perempuan hamil. Pekerjaan non-sif hanya bisa diambil apabila buruh perempuan memenuhi syarat, yaitu memiliki keterangan dari dokter spesialis kandungan dan terdapat kelainan pada kandungan. Sebelum mengambil cuti melahirkan pun buruh diminta untuk menulis surat pernyataan dimana di dalamnya tercantum bahwa buruh tidak akan menuntut perusahaan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kemudian hari. Selain buruh perempuan yang mengalami keguguran, terdapat pula salah seorang buruh perempuan yang mendapatkan vonis endometriosis yang mengharuskan buruh tersebut untuk menjalani operasi. Hal tersebut diakibatkan oleh sulitnya mendapat izin cuti haid. Buruh perempuan nyaris sama sekali tidak dapat mengambil cuti haid karena dokter klinik perusahaan biasanya hanya memberikan obat penghilang rasa sakit alih-alih izin cuti haid.

e. Permasalahan buruh kontrak dan buruh *outsourcing*

Sebanyak 22 orang buruh kontrak dipekerjakan di bagian produksi yang bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, buruh kontrak juga dijanjikan akan menjadi karyawan tetap setelah enam bulan bekerja namun kasus ini sedang dalam proses mediasi dan pihak PT. AFI telah dua kali tidak menghadiri panggilan mediasi. Sementara itu 40 buruh *outsourcing* yang didatangkan dari Jawa Timur ditempatkan di satu rumah dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi, dimana kondisi tersebut sangat tidak layak karena harus berhimpit-himpitan. Belum lagi kondisi makanan yang kurang layak serta penempatan kerja yang bertentangan karena buruh *outsourcing* ditempatkan di bagian produksi utama.

Berdasarkan uraian permasalahan pelanggaran hak buruh PT. AFI tersebut, maka dapat terlihat bahwa permasalahan yang dialami buruh bukan hanya perkara upah murah. Persoalan upah memang masuk ke dalam salah satu isu yang diperjuangkan, namun persoalan upah bukanlah isu tunggal dalam perjuangan buruh. Dalam kasus buruh PT. AFI, permasalahan krusial lainnya seperti kasus keguguran yang dialami buruh hamil menjadi salah satu isu yang mendorong F-SEDAR memulai gerakan sebagai upaya untuk memperjuangkan hak buruh PT. AFI. Dalam upayanya tersebut, F-SEDAR mengorganisir para buruh dan membentuk Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT. AFI) pada pertengahan tahun 2017.<sup>10</sup> Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini menarik untuk dilakukan guna melihat gerakan buruh secara lebih reseptif dengan mendeskripsikan orientasi gerakan F-SEDAR dalam konteks perlawanan terhadap PT. AFI. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas strategi yang digunakan F-SEDAR dalam upayanya memperjuangkan hak buruh.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi F-SEDAR dalam gerakan perjuangan hak buruh PT. AFI?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan F-SEDAR dalam gerakan perlawanan terhadap PT. AFI?

---

<sup>10</sup> *Loc.cit.*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan orientasi F-SEDAR dalam gerakan perlawanan terhadap PT. AFI.
2. Untuk menguraikan strategi yang dilakukan F-SEDAR dalam upaya memperjuangkan hak buruh PT. AFI.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa kontribusi dalam pengembangan kajian Sosiologi, khususnya pada studi gerakan buruh di Indonesia.

Selain itu, diharapkan juga dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan memberi perspektif baru untuk menganalisis orientasi dan strategi dalam gerakan buruh.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi atau literatur baru dalam studi gerakan buruh khususnya dalam mempelajari orientasi dan strategi gerakan, baik untuk F-SEDAR sebagai subjek penelitian maupun organisasi atau kelompok gerakan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan titik tolak untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

## 1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis menjabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan penelitian sejenis terdapat beberapa literatur baik dalam bentuk jurnal nasional, jurnal internasional, maupun tesis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian. Selain itu, tinjauan penelitian sejenis juga dibuat untuk memaparkan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tinjauan penelitian sejenis yang digunakan dalam penelitian ini.

*Pertama* penelitian terkait isu perlindungan hak buruh telah dibahas dalam beberapa artikel jurnal di antaranya adalah artikel dengan judul *Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hongkong* yang ditulis oleh Agung Setiyo Wibowo, artikel berjudul *Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik Malaysia* oleh Irza Khurun'in, dan artikel dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Anna Salmivaara dengan judul *New Governance of Labour Rights: The Perspective of Cambodian Garment Workers' Struggles*. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Setiyo Wibowo berangkat dari permasalahan pelanggaran hak-hak buruh migran Filipina di Hong Kong yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada advokasi perlindungan hak-hak buruh migran, salah satunya adalah Mission for Migrant Workers (MFMW). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsep gerakan sosial sebagai pisau analisis. Hasil dari temuan ini adalah uraian atas peran MFMW dalam mengadvokasi hak-hak buruh migran yang di antaranya adalah mengembangkan pendekatan CIPME untuk layanan keluhan dan konseling buruh migran, menyediakan jasa



pengacara pro-bono, kampanye, membuat jaringan dengan APMM, dan membangun United Filipinos di Hong Kong untuk memberdayakan buruh migran.<sup>11</sup> Pada bagian akhir, Agung menjelaskan bahwa keberhasilan MFMW dalam advokasi perlindungan hak-hak buruh migran Filipina di Hong Kong didorong oleh kuatnya koalisi di tingkat domestik dan transnasional, pembingkaihan isu dengan diskursus keagamaan, dan pemanfaatan media yang dinilai ampuh untuk mengenalkan isu maupun advokasi di tingkat yang lebih luas.<sup>12</sup>

Lalu, penelitian dengan judul *Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik Malaysia* bertujuan untuk melihat formasi gerakan di seputar isu perlindungan hak buruh migran sektor domestik di Malaysia dengan melihat aktivisme transnasional dari empat organisasi masyarakat sipil, yaitu Women's Aid Organization (WAO), Tenaganita, North South Initiative (NSI), dan Archdiocesan Office of Human Development (AOHD).<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formasi gerakan perlindungan hak buruh migran berkisar antara klaim kemanusiaan, hak asasi manusia, kesetaraan gender dalam tempat kerja, dan hak-hak buruh.<sup>14</sup> Selain itu, hasil penelitian dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa peluang transnasionalisasi gerakan tidak lepas dari perubahan lingkungan politik internasional dan nasional serta akar cosmopolitan yang berpengaruh pada pembentukan identitas kolektif. Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Agung Setiyo W, 2015. *Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hongkong*. Andalas Journal of International Studies Vol. 4 No. 1, Hal. 58.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 61.

<sup>13</sup> Irza Khurun'in, 2017. *Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik di Malaysia*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5 No.2, Hal. 182.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 185.

strategi mobilisasi politik terbagi dalam tiga level, yaitu level *grassroot*, level nasional, dan level internasional.<sup>15</sup>

Jika dua penelitian sebelumnya membahas isu perlindungan hak buruh dalam suatu negara, maka penelitian yang dilakukan oleh Anna Salmivaara ini membahas tentang isu perlindungan hak buruh dalam ruang lingkup yang lebih luas, yakni di dunia ketiga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kerangka hukum perlindungan hak-hak buruh beserta implementasinya ditengah transfer produksi industri ke negara-negara dunia ketiga yang didorong oleh globalisasi neoliberalisme.<sup>16</sup> Artikel ini menganalisis hubungan antara tata kelola baru dan krisis buruh melalui studi kasus pada industri garmen di Kamboja. Peneliti menyebutkan bahwa industri garmen adalah salah satu contoh dimana produksinya disusun ke dalam rantai pasokan global, dimana praktik pelanggaran hak buruh semakin merajalela. Mengacu pada literatur teoritis tentang tata kelola baru dan regulasi swasta tentang hak-hak buruh dan data penelitian dari Kamboja, artikel ini menggambarkan bagaimana kebutaan akan kekuasaan dari inisiatif tata kelola menyiratkan pengabaian atas konflik ekonomi yang melekat pada hubungan buruh-pengusaha dan kemungkinan konflik politik antara buruh dan pemerintah. Alih-alih mengisi kesenjangan dalam regulasi yang berpusat pada negara, inisiatif tata kelola mungkin berfungsi sebagai penyamaran dimana pemerintah dapat menggunakan regulasi mereka untuk tujuan yang berlawanan, yaitu membatasi hak-hak serikat pekerja dan klaim keadilan sosial.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang melemahkan serikat pekerja tidak hanya merusak gerakan buruh tetapi juga akuntabilitas demokrasi. Maka, mengakui kekuatan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 189-190.

<sup>16</sup> Anna Salmivaara, 2018. *New Governance of Labour Rights: The Perspective of Cambodian Garment Workers' Struggles*. Globalizations Vol. 15 No. 3, Hal. 329.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 341.

kepentingan dibalik ‘kesenjangan’ memungkinkan kita untuk lebih memahami tantangan memperkuat hak-hak serikat pekerja, khususnya di negara dunia ketiga.<sup>18</sup>

*Kedua*, penelitian yang membahas tentang gerakan buruh pada artikel berjudul *Dualitas Dalam Gerakan Buruh di Indonesia* oleh Sigit Rochadi. Penelitian ini berangkat dari persoalan tentang studi gerakan buruh di Indonesia yang terpolarisasi ke dalam dua cara pandang, yaitu antara gerakan buruh sebagai gerakan politik maupun gerakan buruh sebagai gerakan ekonomi. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode analisis data sekunder. Dalam artikel ini peneliti berargumen bahwa gerakan buruh di Indonesia paling tepat dipahami sebagai gerakan dualitas.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan gerakan buruh di Indonesia tidak mengikuti pola gerakan buruh di Eropa Timur yang memiliki tujuan politik dan bukan pula mengikuti pola gerakan buruh di Amerika Serikat yang memiliki tujuan ekonomi. Dilacak dari sejarah kelahirannya, gerakan buruh di Indonesia mengejar tujuan politik dan ekonomi secara bersamaan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, peneliti menawarkan analisisnya dengan konsep dualitas (*duality*) yang dikemukakan Anthony Giddens (2003). Konsep ini dikemukakan oleh Giddens untuk menyelesaikan ketegangan di antara para ilmuwan sosial dalam menjelaskan fenomena sosial sehingga dalam penulisan artikel peneliti menggunakan konsep ini dengan sedikit modifikasi agar dapat sesuai dengan konteks gerakan buruh yang ingin dibahas. Berdasarkan hasil analisis peneliti, penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa berkembangnya gerakan buruh di Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial lahirnya gerakan buruh, relasi eksklusif antara buruh dengan negara, keanekaragaman masyarakat Indonesia, serta industrialisasi yang meluas dan kurang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 342.

<sup>19</sup> Sigit Rochadi, 2016. *Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia*. SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan Vol. 9 No.1, Hal. 90.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 91.

melakukan pendalaman pada teknologi. Selain itu, kegagalan pemerintah Soeharto dalam memaksakan gerakan ekonomi bagi parah buruh juga turut menguatkan dualitas dalam gerakan buruh pasca pemerintahan Orde Baru.<sup>21</sup>

Isu tentang gerakan buruh juga diangkat dalam artikel berjudul *Konstruksi Kesadaran Buruh Tentang Hak Buruh (Studi Peran FSPMI dalam Gerakan Buruh di Pasuruan)* oleh Muqtafiah dan Maulana Surya Kusumah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk mengetahui proses konstruksi yang dilakukan oleh FSPMI dalam gerakan buruh di Pasuruan. Hasil penelitian membawa peneliti kepada suatu kesimpulan bahwa proses konstruksi kesadaran pekerja dalam asosiasi buruh FSPMI dilakukan dengan pendidikan. Melalui pendidikan, FSPMI membentuk kesadaran buruh terkait hak dan kewajibannya.<sup>22</sup> Apabila kesadaran akan hak dan kewajiban telah terkonstruksi, maka kesadaran tersebut akan berkembang menjadi kesadaran kelas, kesadaran gender, hingga kesadaran politik. Dalam melaksanakan gerakan bersama para buruh, FSPMI menerapkan beberapa tahapan yang disebut KLA, yaitu konsep-lobi-aksi. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan gerakan tersebut FSPMI menitikberatkan pada keterlibatan buruh. dimana buruh seharusnya menjadi subjek yang sadar akan tindakannya.<sup>23</sup> Keterlibatan buruh dalam setiap tahapan gerakan bertujuan agar mereka memahami hal-hal yang akan mereka perjuangkan.

Literatur lainnya yang mengangkat isu gerakan buruh adalah disertasi yang disusun oleh Michele Therese Ford dengan judul *NGO as Outsiders Intellectual: A History of Non-Governmental Organitations' Role in the Indonesian Labour Movement*. Tulisan ini

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 101.

<sup>22</sup> Muqtafiah; Maulana Surya Kusumah, 2019. *Konstruksi Kesadaran Buruh Tentang Hak Buruh (Studi Peran FSPMI dalam Gerakan Buruh di Pasuruan)*. Jurnal Entitas Sosiologi Vol. VIII No. 1, Hal. 66.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 77.

mempelajari posisi NGO dalam gerakan buruh di Indonesia dari perspektif historis melalui disiplin sejarah perburuhan dan hubungan industrial. Penelitian dalam disertasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan gagasan Foucault tentang sejarah masa kini (*history of the present*) dan istilah kriteria signifikansi (*criteria of significance*) Hyman yang dijadikan dasar analisis hubungan industrial.<sup>24</sup> Peneliti berpendapat bahwa meskipun NGO berperan sebagai intelektual buruh klasik pada akhir Orde Baru (1989-1998), pengakuan atas peran tersebut dibatasi oleh definisi yang berlaku dari gerakan buruh. Tulisan ini juga mengkaji bagaimana definisi "buruh terorganisir" dan "gerakan buruh" secara historis dibangun untuk mengecualikan intelektual dan organisasi non-serikat. Hal tersebut untuk menjelaskan mengapa LSM buruh dianggap "*outsiders*" di masa sekarang.

Kemudian juga membandingkan catatan sejarah buruh yang ditulis selama Orde Baru (1967-1998) dengan yang ditulis selama periode pasca-kemerdekaan (1945-1965), menunjukkan bahwa sejarah buruh Orde Baru adalah sejarah kemenangan, ditulis untuk menekankan komposisi kelas pekerja dan sifat apolitis dari "serikat buruh sejati". Selain itu juga mengkaji dua fase dalam perkembangan LSM buruh: delapan tahun antara 1991, ketika LSM buruh meluncurkan kampanye besar pertama mereka, dan 1998, ketika Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaan; dan tiga tahun segera setelah pengunduran diri Soeharto. Perkembangan pada awal periode pasca-Soeharto (1998-2001) membawa ketegangan antara partisipasi LSM dalam gerakan buruh dan posisi sebagai orang luar non-pekerja menjadi sangat lega, menuntut kita mempertanyakan apakah definisi gerakan buruh

---

<sup>24</sup> Michele Therese Ford, Disertasi. "*NGO as An Outside Intellectual: A History of Non-Governmental Organizations' Role in The Indonesian Labour Movement*" (Australia: University of Wollongong, 2005). Hal. 2-4.

yang berpusat pada serikat mencerminkan realitas kontemporer buruh terorganisir di Indonesia.

*Ketiga*, penelitian yang membahas tentang orientasi gerakan buruh dengan judul artikel *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi* yang ditulis oleh Muhammad Zuhdan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17 Nomor 3 Tahun 2014. Artikel ini membahas orientasi gerakan buruh yang ditinjau dari perkembangan isu yang diperjuangkan pada setiap pergantian rezim pasca reformasi 1998. Saat Habibie mulai memimpin, isu yang berkembang adalah pembebasan tokoh buruh, ratifikasi konvensi perburuhan, pendirian serikat buruh, dan otonomisasi perburuhan dari kooptasi dan konvensi penguasa. Lalu, saat rezim berada di tangan Megawati, isu buruh merambah ke wilayah kebijakan pemerintah, yaitu isu penolakan kenaikan BBM, isu menolak kenaikan anggaran militer, isu menolak disahkannya UU PKK dan UU PHI, isu kepemimpinan buruh yang kuat, dan isu konsolidasi penyatuan serikat buruh. Kemudian, isu perburuhan yang hangat selama rezim Gus Dur berlangsung adalah penuntutan buruh terhadap pembatalan Undang-Undang No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dan isu penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Upah Pesangon, Uang Penghargaan dan Ganti Rugi oleh Perusahaan yang dianggap buruh sebagai titik penting perlindungan hak buruh. Pada masa rezim kepemimpinan SBY pun isu yang diperjuangkan buruh sangat beragam. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga memperjuangkan isu jaminan sosial, BPJS, isu kesetaraan dan keadilan gender, isu kewarganegaraan, isu buruh *Go Politic*, hingga isu fragmentasi serikat

buruh karena chauvinisme dan eksklusivisme kelompok dan isu lintas sektoral.<sup>25</sup> Maka, dengan mendasarkan diri pada perkembangan isu yang diperjuangkan buruh untuk melihat gerakan buruh sekarang, dapat dikatakan bahwa gerakan buruh di Indonesia sudah sampai pada fase gerakan *New Labour* yang tidak hanya berkutat pada masalah upah atau hubungan industrial semata tapi sudah jauh melangkah ke isu-isu yang bersifat politik praktis maupun politik makro.<sup>26</sup>

Suatu artikel karya Sek Hong Ng dan Olivia Ip dengan judul *Dialectics of Capitalism: A Re-Visit to the Hong Kong Chinese Labor Movement and Perlman's Model* yang dimuat dalam jurnal internasional *Labor History* Volume 45 Nomor 4 Tahun 2004 juga membahas tentang gerakan buruh serta orientasinya. Artikel ini menawarkan interpretasi dialektis terhadap hubungan antara kapitalis dan gerakan buruh dengan menggunakan peristiwa pemogokan dan boikot massal Hong Kong-Kanton yang terkenal dalam sejarah perburuhan Hong Kong pada tahun 1925-1926 sebagai ilustrasi. Peneliti menggunakan teori umum gerakan buruh yang dirumuskan oleh Selig Perlman untuk menganalisis pemboikotan dan pemogokan massal tersebut. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Perlman mengajukan teori umum untuk menjelaskan kemunculan dan perkembangan gerakan buruh. Belajar dari pengalaman organisasi buruh di Inggris, Jerman, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, Perlman merumuskan teori umum gerakan buruh yang berasumsi bahwa karakter serikat buruh di negara manapun dan kapanpun ditentukan oleh peran dan hubungan timbal balik antara kapitalis, intelektual dan kekuatan organisasi buruh. Perlman merumuskan tiga variabel utama yang menentukan terbentuknya gerakan buruh, yaitu resistensi terhadap kapitalisme,

---

<sup>25</sup> Muhammad Zuhdan, 2014. *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Vol. 17 No. 3, Hal. 279-287.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 288.

tingkat dominasi para intelektual atas gerakan buruh, dan tingkat kematangan kesadaran serikat pekerja yang didefinisikan oleh kesadaran internal buruh.<sup>27</sup> Pemikiran Perlman kemudian diterapkan dalam gerakan buruh China dimana pada saat itu terjadi konflik antara kelas sosial dan kepentingan ekonomi akibat penolakan serikat pekerja modern terhadap kehadiran modal asing. Peneliti menjelaskan bahwa sikap anti-asing dari serikat pekerja modern di Tiongkok bertentangan dengan gagasan Perlman. Peneliti menekankan bahwa, sebagai fokus konseptual untuk diskusi, campur tangan pengaruh asing hampir tidak masuk ke dalam model teoritis Perlman. Model Perlman pada dasarnya mendalilkan sifat dan perkembangan gerakan buruh suatu negara ke dalam ‘kerangka tertutup’. Faktor tersebut bagi peneliti penting untuk menghargai hubungan yang kompleks dan ambivalen antara gerakan buruh Cina dengan kapitalisme.<sup>28</sup>

*Keempat*, penelitian tentang strategi gerakan serikat buruh dimuat dalam artikel jurnal berjudul *Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang* yang ditulis oleh Hery Setyawan dan Mochammad Arif Affandi. Penelitian ini mengkaji tentang strategi perjuangan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) –Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSVI) dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa SBPJ-GSBI memadukan strategi gerakan massa dan advokasi dalam menuntut kenaikan upah. SBPJ-GSBI menggunakan strategi gerakan massa dengan menggalang kekuatan internal dan membuat front persatuan baik dengan serikat buruh maupun di luar serikat buruh seperti

---

<sup>27</sup> Sek Hong Ng; Olivia Ip, 2004. *Dialectics of Capitalism: A Re-Visit to The Hong Kong Chinese Labor Movement and Perlman's Model*. Labor History Vol. 45 No. 4, Hal. 470.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 478



masyarakat umum, mahasiswa, LSM, serta akademisi untuk memperluas gerakan. Gerakan massa ini diperkuat dengan keterlibatan SBPJ-GSBI dalam dewan pengupahan sebagai strategi advokasi.<sup>29</sup>

Pemaparan tinjauan penelitian sejenis bertujuan untuk menerangkan bahwa isu yang diangkat dalam penelitian ini merupakan permasalahan umum yang pernah diteliti sebelumnya. Meskipun memiliki kesamaan dalam isu yang dibahas, tentunya tetap terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara garis besar, perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada pengemasan isu dimana penelitian ini membahas fenomena gerakan buruh dengan melihat orientasi dan strategi yang dilakukan federasi serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh yang belum dibahas secara bersamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini peneliti sajikan perbandingan dalam bentuk tabel untuk melihat dengan lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel 1. 1. Perbandingan Penelitian Sejenis**

No	Judul, Peneliti, Sumber Pustaka, Jenis Pustaka	Konsep/Teori	Metodologi	Persamaan	Perbedaan
1.	New Governance of Labour Rights: The Perspective of Cambodian Garment Workers' Struggles oleh Anna Salmivaara dalam Globalizations Volume 15 Nomor 3 Tahun 2018 hal. 329-346. Diakses melalui <a href="https://e-resources.perpusnas.go.id/2148/doi/pdf/10.1080/14747731.20">https://e-resources.perpusnas.go.id/2148/doi/pdf/10.1080/14747731.20</a>	Konsep hak serikat pekerja dan perjuangan buruh	Kualitatif	Mengangkat isu lemahnya perlindungan terhadap buruh dalam praktik pelanggaran hak buruh	Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada regulasi yang justru melemahkan hak buruh dengan mengangkat industri garmen di Kamboja sebagai studi kasus

<sup>29</sup> Hery Setyawan; Mochamad Arif Affandi, 2017. *Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang*. Jurnal Paradigma Vol. 5 No. 3, Hal. 11.

	<a href="https://doi.org/10.1177/00140139171394069">17.1394069?needAccess=true</a> Jurnal Internasional.				
2.	Dialectics of Capitalism: A Re-Visit to The Hong Kong Chinese Labor Movement and Perlman's Model oleh Sek Hong Ng dan Olivia Ip dalam Labor History Volume 45 Nomor 4 Tahun 2004, hal. 469-496. Diakses melalui <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0023656042000256225">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0023656042000256225</a> Jurnal Internasional.	Teori umum gerakan buruh oleh Selig Perlman	Kualitatif	Mengangkat tema gerakan serikat buruh disertai dengan orientasinya	Menempatkan teori gerakan buruh untuk menganalisis isu lampau gerakan buruh di Cina
3.	Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina Di Hongkong oleh Agung Setiyo Wibowo dalam Andalas Journal of International Studies Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015 hal. 48-63. Diakses melalui <a href="http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/37/33">http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/37/33</a> Jurnal Nasional	Konsep gerakan sosial transnasional oleh Khagram dan Alvord	Kualitatif	Membahas isu pelanggaran hak buruh dan upaya untuk memperjuangkan hak buruh beserta dengan strategi yang digunakan	Subjek dalam penelitian ini bukanlah serikat buruh melainkan NGO yang berfokus pada advokasi perlindungan hak buruh. Selain itu, perbedaan juga terletak dalam setting sosial dimana penelitian ini membahas tentang hak buruh migran Filipina di Hongkong
4.	Melintasi Batas Negara-Bangsa: Formasi Gerakan Perlindungan Hak Buruh Migran Domestik di Malaysia oleh Irza Khurun'in dalam Jurnal Hubungan Internasional Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 hal. 181-192. Diakses melalui	Konsep aktivisme transnasional, konsep identitas kolektif Alberto Melucci, konsep <i>Framing Collective</i> oleh Benford dan Snow, serta konsep <i>Transnasional Advocacy</i>	Kualitatif	Membahas gerakan yang berkisar pada tuntutan terhadap hak-hak buruh	Penelitian ini meletakkan fokusnya pada aktivitas transnasional empat NGO dalam gerakan perlindungan hak buruh migran sektor domestik Malaysia

	<a href="https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2179/2807">https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2179/2807</a> Jurnal Nasional.	Network oleh Keck dan Sikkink.			
5.	Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia oleh Sigit Rochadi dalam SOSIOHUMANIKA : Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2016 hal. 98-104. Diakses melalui <a href="http://repository.una.ac.id/31/1/2.%20Sigit%20Rochadi.pdf">http://repository.una.ac.id/31/1/2.%20Sigit%20Rochadi.pdf</a> Jurnal Nasional.	Konsep Dualitas oleh Anthony Giddens	Kualitatif	Membahas gerakan buruh beserta tuntutan-tuntutan dalam gerakan tersebut	Penelitian ini membahas gerakan buruh dan orientasinya dengan menelusuri sejarah gerakan buruh di Indonesia tanpa memilih satu organisasi buruh sebagai studi kasus
6.	Konstruksi Kesadaran Buruh Tentang Hak Buruh (Studi Peran FSPMI dalam Gerakan Buruh di Pasuruan) oleh Muqtafiah dan Maulana Surya Kusumah dalam Jurnal Entitas Sosiologi Volume VIII Nomor 01 Tahun 2019 hal. 58-81. Diakses melalui <a href="https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/article/download/16647/7767/">https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/article/download/16647/7767/</a> Jurnal Nasional.	Konsep konstruktivisme	Kualitatif	Membahas upaya federasi serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh	Perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti dimana penelitian ini mengkaji federasi serikat buruh FSPMI yang berupaya memperjuangkan hak buruh di Kabupaten Pasuruan
7.	Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi oleh Muhammad Zuhdan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17 Nomor 3 Tahun 2014 hal. 272-290. Diakses melalui <a href="https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13086">https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13086</a>	Konsep Kiri Baru ( <i>The New Left</i> )	Kualitatif	Membahas analisis orientasi gerakan buruh berdasarkan isu-isu yang diangkat dalam gerakan buruh tersebut	Penelitian ini mengkaji orientasi gerakan buruh secara lebih luas berdasarkan perkembangan isu yang diperjuangkan setiap pergantian rezim di Indonesia

	Jurnal Nasional.				
8.	Strategi Perjuangan Serikat Buruh dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang oleh Hery Setyawan dan Mochammad Arif Affandi dalam Jurnal Paradigma Volume 5 Nomor 3 Tahun 2017 hal. 1-11. Diakses melalui <a href="https://www.neliti.com/id/publications/253188/strategi-perjuangan-serikat-buruh-dalam-tuntutan-kenaikan-upah-di-kabupaten-jomb#id-section-content">https://www.neliti.com/id/publications/253188/strategi-perjuangan-serikat-buruh-dalam-tuntutan-kenaikan-upah-di-kabupaten-jomb#id-section-content</a> Jurnal Nasional.	Teori gerakan sosial	Kualitatif	Membahas strategi gerakan serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh	Studi kasus dalam penelitian ini berbeda, dimana penelitian ini mengkaji Serikat Buruh PlyWood Jombang (SBPJ) yang menuntut kenaikan upah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur
9.	NGO as Outside Intellectual: A History of Non-Governmental Organisations' Role in The Indonesian Labour Movement oleh Michele Therese Ford dalam Disertasi Program Studi Politik Sejarah Universitas Wollongong Australia. Diakses melalui <a href="https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1150&amp;context=theses">https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1150&amp;context=theses</a> Disertasi.	Konsep sejarah masa kini Foucault dan kriteria signifikansi Hyman	Kualitatif	Mempelajari organisasi dalam gerakan buruh	Secara khusus membahas NGO dalam gerakan buruh di Indonesia dengan perspektif historis

(Sumber: Analisis Peneliti, 2020)

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1. Federasi Serikat Buruh

Definisi federasi serikat buruh telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai gabungan beberapa serikat

buruh baik berdasarkan sektor usaha, antar sektor usaha sejenis atau tidak, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa federasi serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, baik serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Konsep federasi serikat buruh dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehadiran serikat F-SEDAR sebagai wadah kuat yang dapat memperjuangkan hak-hak para buruh di tengah kecenderungan kedudukan buruh yang lemah dalam manajemen suatu perusahaan. Dalam permasalahan hubungan

industrial antara buruh dengan perusahaan, F-SEDAR diharapkan dapat memainkan perannya untuk mengakomodasi aspirasi para buruh dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya agar dapat didengar oleh pihak perusahaan.

### 1.6.2. Advokasi Hak Buruh

Pengertian advokasi secara umum adalah serangkaian gerakan sistemik dan terorganisir yang dilakukan secara sadar untuk mendorong perubahan sosial dengan bertumpu pada pedoman nilai-nilai keadilan, kebenaran, akuntabilitas, transparansi, dan pedoman nilai lainnya.<sup>30</sup> Menurut Ruta R. Sharma, advokasi merupakan upaya memasukkan suatu permasalahan ke dalam agenda, mencari solusi atas masalah tersebut dan membangun dukungan untuk bertindak menangani masalah maupun solusinya.<sup>31</sup> Disisi lain, advokasi secara filosofis bersumber dari hak asasi manusia sehingga pelaksanaan advokasi pun bertujuan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Dengan kata lain, advokasi dilakukan sebagai upaya memenuhi hak-hak individu maupun sekelompok orang yang merasa haknya belum terpenuhi.<sup>32</sup>

Advokasi secara umum dibagi menjadi advokasi hukum dan non-hukum. Advokasi hukum merupakan advokasi yang dilaksanakan dalam lembaga-lembaga peradilan dalam rangka mendapatkan suatu keputusan hukum. Sedangkan advokasi non-hukum merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan oleh siapa saja warga masyarakat demi mencapai, mengubah, atau memengaruhi suatu kebijakan publik.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> M. Tamyiza Mukharrom, 2004. *“Teologi Advokasi”*. Al-Mawarid Edisi XII, Hal.111.

<sup>31</sup> Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *“Advokasi Sosial”*, [https://bppps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/advokasi-sosial.pdf](https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/advokasi-sosial.pdf) (diakses pada 18 Juli 2021)

<sup>32</sup> Muhammad Wildan, dkk. 2014. *“Modul Workshop Advokasi Sosial”*. Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal. 18.

<sup>33</sup> Luthvi Febrycka Nola, 2014. *“Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”*. Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No.2, Hal. 193.

Advokasi hukum kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan prosedur dan mekanisme menjadi advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Advokasi litigasi merupakan advokasi yang dilakukan pada ranah pengadilan guna memperoleh keputusan resmi dengan bentuk kegiatan advokasinya meliputi *class action*, *judicial review*, dan *legal standing*. Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat dan negosiasi desakan massa (meliputi demonstrasi, mogok makan, kependudukan, dll) untuk memperjuangkan haknya.<sup>34</sup>

Advokasi tidak hanya bernuansa *to advocate* (pembelaan) tetapi juga *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan) sehingga dalam pelaksanaannya pun strategi dan metode advokasi sangat bergantung pada konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut Edi Soeharto (2006), permasalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi advokasi kasus dan advokasi kelas.<sup>35</sup> Advokasi kasus adalah kegiatan membantu seseorang agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan yang menjadi haknya karena telah mengalami diskriminasi atau ketidakadilan. Sedangkan advokasi kasus merujuk pada kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan.<sup>36</sup>

Terdapat empat strategi advokasi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari praktik advokasi itu sendiri. *Pertama*, membangun basis gerakan yaitu kaitannya dengan sosialisasi dan mobilisasi massa. *Kedua*, membangun jaringan yaitu kaitannya dengan penggalangan sekutu dan satuan pendukung. Sekutu

---

<sup>34</sup> M. Tamyiza Mukharrom, *op.cit.*

<sup>35</sup> Muhamad Wildan, dkk, *loc.cit.*, Hal. 28.

<sup>36</sup> Teuku Zulyadi, 2014. "Advokasi Sosial". Jurnal Al-Bayan Vol. 21 No. 30, Hal. 66-67.

adalah orang ataupun kelompok yang mendukung dan ikut terlibat dalam aksi advokasi. Sedangkan satuan pendukung adalah orang atau kelompok yang tidak terlibat dalam aksi tetapi hanya memberikan dukungan saja (*supporting unit*). *Ketiga*, membentuk opini publik. Para pihak yang terlibat dalam proses advokasi berperan menjadi *agenda setter* yang berusaha untuk memengaruhi opini publik agar sejalan dengan yang diinginkan sehingga proses advokasi akan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Opini dapat dibangun melalui kegiatan-kegiatan seperti kampanye, demonstrasi, aksi mogok, pembangkangan dan perlawanan diam-diam. *Keempat*,engaruhi pembuat kebijakan dalam hal ini tatalaksana hukum. Proses mempengaruhinya dapat melalui lobi yaitu sebuah kegiatan advokasi dalam mempengaruhi para pengambil keputusan agar memberikan dukungan terhadap isu-isu yang diadvokasikan.<sup>37</sup>

Apabila konsep advokasi ditarik ke dalam konteks perburuhan, maka advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pemenuhan hak buruh dengan memasukkan berbagai permasalahan yang dialami buruh ke dalam suatu agenda penyelesaian atas masalah tersebut. Dengan begitu, penelitian ini menggunakan konsep advokasi untuk menganalisis upaya F-SEDAR dalam memenuhi hak buruh PT. AFI serta menjelaskan strategi-strategi yang digunakan F-SEDAR dalam menjalankan upayanya tersebut.

---

<sup>37</sup> Hadi Pratomo. *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 90.



### 1.6.3. Gerakan Serikat Buruh

Gerakan serikat buruh dapat diartikan sebagai aktivitas kolektif serikat buruh dalam mengorganisir kekuatan-kekuatan kaum buruh untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk pelanggaran hak dan kepentingan buruh serta tindakan yang merugikan pihak buruh. Apabila melihat dari perspektif Sydney Tarrow tentang gerakan sosial, maka gerakan buruh dapat diartikan sebagai gerakan yang mengandung tantangan kolektif (*collective challenge*) dan diarahkan kepada elite dan pemegang kekuasaan serta di dalamnya terdapat tujuan bersama dan solidaritas dari kaum buruh itu sendiri.<sup>38</sup> Secara historis, banyak pertimbangan bahwa konseptualisasi dan peneorion gerakan buruh berasal dari Marx dan reaksi terhadap Marxisme.<sup>39</sup>

Marx pada dasarnya tertarik untuk merumuskan teori sejarah dan mendirikan sistem intelektual umum sehingga hanya sebagian dari pemikiran Marx yang ditujukan untuk diidentikan dengan buruh atau kelas pekerja. Oleh karena itu, di dalam teorinya yang bersifat klasik dan dibangun di atas teori nilai kerja, Marx diyakinkan oleh argumen filosofinya sendiri bahwa kelas pekerja pada akhirnya akan menang dalam masyarakat namun hanya sedikit dari karyanya yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan material para buruh telah, dapat, atau bahkan, harus ditingkatkan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, pemikiran Marx tidak secara spesifik menjelaskan tentang gerakan buruh. Dalam hal ini, kritik terhadap Marxisme dan perkembangan

---

<sup>38</sup> Sydney Tarrow, *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Mass Politics in The Modern State* (Cambridge: Cambridge University, 1996). Hal. 4.

<sup>39</sup> Mark Perlman, 1960. *“Labor Movement Theories: Past, Present, and Future”*, *Industrial and Labor Relations Review* Vol. 13 No. 3, Hal. 339

<sup>40</sup> *Ibid.*

penelitian ilmiah pada akhir abad kesembilan belas menghadirkan pendekatan yang lebih luas dan lebih rasional terhadap masalah gerakan buruh.<sup>41</sup>

Salah satu pendekatan terhadap masalah gerakan buruh dibahas dalam teori gerakan buruh yang dirumuskan oleh Selig Perlman. Dalam teori yang dirumuskannya tersebut, Perlman membedakan buruh ke dalam dua klasifikasi, yaitu buruh organik yang merupakan buruh yang sebenarnya di pabrik, dan buruh sebenarnya yang merupakan produk kaum intelektual—yang di dalam banyak kasus bukan berasal dari kelas pekerja. Menurut Perlman, gerakan buruh yang matang bukan didominasi oleh konsepsi kaum intelektual, tetapi oleh filsafat atau ideologi yang tumbuh dari kebutuhan dan aspirasi “buruh organik”. Kaum “buruh organik” menyadari bahwa kesempatan kerja merupakan komoditi terbatas dan langka sehingga harus dilindungi dengan cara apapun. Kesadaran akan kelangkaan itulah yang akhirnya melahirkan keinginan dari dalam diri buruh untuk berorganisasi dan mendorong adanya gerakan buruh.

Penafsiran akan gerakan buruh sebagai hasil dari kesadaran kelangkaan tersebut membantu untuk menjelaskan tindakan buruh yang terorganisir.<sup>42</sup> Dalam penafsiran tersebut, buruh bukanlah seorang ideolog dan tidak memiliki ketertarikan untuk mempromosikan jenis institusi sosial tertentu.<sup>43</sup> Oleh karena itu, tujuan gerakan buruh dalam teori Perlman bukanlah untuk menggulingkan kapitalisme dan memperkenalkan sosialisme seperti yang disampaikan dalam pandangan klasik

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal. 340

<sup>42</sup> Philip Taft, 1950. “*A Rereading of Selig Perlman’s: A Theory of the Labor Movement*”. *Industrial and Labor Relations Review* Vol. 4 No. 1, Hal. 74

<sup>43</sup> *Ibid.*

tentang buruh. Perlman berpendapat bahwa gerakan buruh memiliki tujuan utama dan tujuan sekunder. Tujuan utama gerakan serikat buruh adalah menguasai pekerjaan secara maksimal dan mendapat sebanyak mungkin pekerjaan. Sedangkan tujuan sekunder gerakan buruh adalah memperbaiki “kondisi kerja” dan “ekonomi”.

Implikasi dari pemikiran Perlman tentang tujuan gerakan buruh tersebut adalah prinsip “*collective bargaining*” atau perundingan bersama. Perlman menjelaskan bahwa *collective bargaining* bukan sekedar sarana untuk menaikkan upah dan memperbaiki kondisi kerja, melainkan sebuah teknik dimana suatu kelompok inferior melakukan tekanan untuk mendapatkan kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan lebih bagi anggotanya. Dalam hal ini, melalui perundingan bersama, kelompok inferior tersebut memanasifestasikan dirinya secara setara dalam politik, legislasi, litigasi, pengadilan, administrasi pemerintahan, agama, pendidikan, dan propaganda. Perundingan bersama juga bukan hanya sekedar fenomena dalam masyarakat modern karena manifestasinya yang paling jelas dan komprehensif ditunjukkan oleh komunitas perkotaan dan serikat pekerja dalam perjuangan melawan kapitalis.<sup>44</sup> Perlman juga menjelaskan bahwa perundingan bersama sebagai teknik kebangkitan kelas baru sangat berbeda dengan perjuangan kelas kaum Marxis. Perundingan bersama merupakan hal yang pragmatis dan konkret, bukan idealis dan abstrak. Dimana dalam perundingan bersama, kaum buruh memperoleh dorongan emosionalnya bukan dari keinginan untuk menggantikan atau menghapus “kelas lama

---

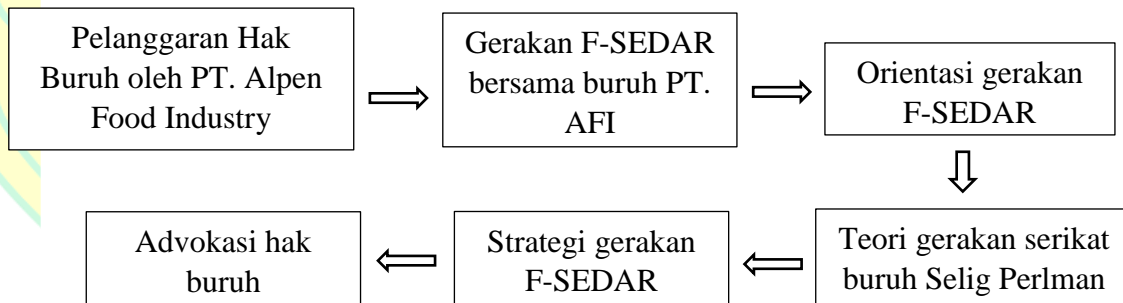
<sup>44</sup> Selig Perlman, 1936. “*The Principle of Collective Bargaining*”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 184 No.1, Hal. 154

yang berkuasa”, tetapi dari keinginannya untuk membawa kelasnya sendiri mengikuti kelas superior, dan mendapatkan hak yang sama sebagai “kelas”.<sup>45</sup>

Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa gerakan serikat buruh dalam teori Selig Perlman diinterpretasikan sebagai aktivitas kolektif kaum buruh yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki kondisi kerja serta ekonomi melalui upaya perundingan bersama sebagai teknik untuk mendapatkan kesejahteraan dan hak yang sama. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini menggunakan teori gerakan buruh Selig Perlman sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan gerakan F-SEDAR beserta tujuannya dalam memperjuangkan hak buruh PT. AFI.

## 1.7. Kerangka Berpikir

**Skema 1. 1. Kerangka Berpikir  
Upaya Federasi SEDAR dalam Memperjuangkan Hak Buruh PT. AFI**



(Sumber: Analisis Peneliti, 2021)

<sup>45</sup> *Ibid.*

## 1.8. Metodologi Penelitian

### 1.8.1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menyajikan penjelasan lengkap tentang objek yang diteliti secara mendalam. Menurut John W. Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu maupun kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>46</sup> Dengan begitu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek yang diteliti secara terperinci dengan sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang mengeksplorasi dan mempelajari suatu kasus spesifik yang menjadi perhatian peneliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengkaji orientasi dan strategi gerakan F-SEDAR sebagai federasi serikat buruh dengan berfokus pada permasalahan pelanggaran hak buruh oleh PT Alpen Food Industry sebagai fenomena spesifik yang ingin diteliti. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus yang diteliti. Jenis penelitian studi kasus digunakan agar penelitian memiliki batasan yang terperinci dan memiliki pengambilan data yang mendalam.

---

<sup>46</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (4<sup>th</sup> Ed.)* (USA: SAGE Publications, 2014), Hal. 3.

### 1.8.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif didapatkan dengan menggali informasi secara mendalam melalui teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan model pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat mengeksplor jawaban informan serta memperoleh informasi yang mendalam. Lalu untuk menunjang kelengkapan data, peneliti juga melakukan observasi. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indera pengamat untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.<sup>47</sup> Melalui observasi, peneliti dapat melihat, mengamati, dan mencatat baik perilaku maupun kejadian yang terjadi pada *setting* alamiah. Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang rumit serta mengecek kebenaran atas informasi yang diragukan kebenarannya atau dikhawatirkan terjadi bias. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini didapat dari berbagai dokumen yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Adapun bentuk dokumen yang dijadikan sumber data sekunder dapat berupa buku, artikel jurnal,

---

<sup>47</sup> John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4<sup>th</sup> Ed.)* (USA: SAGE Publications, 2018), Hal. 283.

pemberitaan di media massa, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

### 1.8.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan banyak proses, di antaranya adalah pengorganisasian data, pembacaan awal database, pengkodean dan pengorganisasian tema yang mewakili data serta membentuk interpretasinya. Setiap proses tersebut saling terhubung dan membentuk spiral kegiatan yang semuanya terkait dengan representasi analisis data.<sup>48</sup> Dalam hal ini, proses analisis data dalam penelitian kualitatif digambarkan dengan spiral analisis data.<sup>49</sup> Spiral analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup kegiatan mengelola dan mengorganisir data; membuat memo; menggambarkan dan mengklasifikasikan kode menjadi tema; mengembangkan dan membuat interpretasi; serta memvisualisasikan data.

Setelah mengumpulkan data, mengelola dan mengatur data merupakan *loop* pertama dalam spiral yang memulai proses analisis data.<sup>50</sup> Setelah mengorganisir data, proses analisis dilanjutkan dengan memahami keseluruhan basis data. Pada tahap ini peneliti membaca dan membuat memo—yang merupakan teknik analisis sistematis—untuk membantu melacak pengembangan ide melalui proses.<sup>51</sup> Kemudian, peneliti

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal. 302.

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 308.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal. 309.

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal. 311.

menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data dengan membangun deskripsi rinci, menerapkan kode, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan interpretasi berdasarkan pandangan peneliti sendiri atau pandangan perspektif dalam literatur.<sup>52</sup> Proses ini merupakan jantung dari analisis data kualitatif karena melibatkan pemahaman peneliti terhadap teks yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data dilanjutkan dengan mengembangkan interpretasi dimana proses ini melibatkan pengabstraksian di luar kode dan tema menuju makna data yang lebih besar untuk memahami data.<sup>53</sup> Tahap akhir dalam spiral analisis data adalah mewakili dan memvisualisasikan data. Disini peneliti mewakili mengemas data yang ditemukan ke dalam bentuk teks, tabel, atau gambar.<sup>54</sup>

#### **1.8.4. Validitas Data**

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus teruji keabsahannya, oleh karena itu peneliti harus melakukan validasi terhadap data-data yang terkumpul. Dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik menguji keakuratan data temuan dengan menggunakan hal di luar data itu sendiri untuk diperiksa dan dibandingkan dengan data terkait. Proses pemeriksaan dan pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal. 314.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 320.

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal. 322.



dengan triangulasi sumber dimana peneliti mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber yang berbeda.

#### **1.8.5. Peran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci atau *key instrument* dari penelitian itu sendiri.<sup>55</sup> Peneliti berperan dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul, hasil analisis, dan kualitas penelitian bergantung pada kemampuan peneliti dalam menjalankan perannya sebagai *key instrumen* dalam penelitian. Oleh karena itu, fleksibilitas dan sikap kritis serta terbuka sangat diperlukan peneliti agar dapat beradaptasi dengan dinamika yang terjadi saat pengumpulan data di lapangan.

#### **1.9. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Masing-masing bagian akan dibagi kembali ke dalam lima pembabakan mulai dari BAB I hingga BAB V yang akan diuraikan sebagai berikut.

**BAB I**, bab ini diawali dengan latar belakang permasalahan yang diteliti. Latar belakang penelitian disusun untuk melihat gambaran fenomena yang akan dikaji serta argumentasi mengapa fenomena atau permasalahan tersebut layak untuk diteliti. Oleh

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal. 96.

karena itu, latar belakang penelitian ini menjelaskan permasalahan pelanggaran hak buruh oleh PT. AFI dan gerakan perlawanan yang dilakukan F-SEDAR sebagai federasi yang menaungi serikat buruh SGBBI PT. AFI. Dalam gerakan tersebut terdapat berbagai isu buruh yang diperjuangkan sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana upaya F-SEDAR dalam memperjuangkan hak buruh. Selain itu, bab ini juga memaparkan permasalahan dan tujuan penelitian yang difokuskan pada orientasi gerakan dan strategi gerakan F-SEDAR. Kemudian bab ini juga menjelaskan manfaat penelitian dari segi teoritik maupun praktik, serta menguraikan tinjauan penelitian sejenis dan kerangka konsep yang diharapkan dapat membantu penyusunan penelitian ini. Kemudian, bab ini dilanjutkan dengan kerangka berpikir yang dibuat sebagai upaya untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun penelitian ini. Bab ini juga memuat penjelasan metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu metodologi kualitatif. Penjelasan metode penelitian dalam bab ini akan diuraikan kembali ke dalam beberapa Sub bab pembahasan mengenai jenis penelitian, teknik triangulasi data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan. Sebagai penutup, bab ini menguraikan sistematika penulisan untuk mendeskripsikan pembabakan dalam penelitian ini.

**BAB II**, pembahasan dalam bab ini meliputi pemaparan sejarah ekonomi politik gerakan serikat buruh di Indonesia, deskripsi profil F-SEDAR sebagai organisasi serikat buruh yang di dalamnya juga mencakup pembahasan mengenai sejarah, struktur kepengurusan, program yang dijalankan F-SEDAR, serta profil dan karakteristik informan penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tentang proses afiliasi

antara Federasi SEDAR dengan SGBBI PT. AFI sebagai upaya menjaring kekuatan dalam gerakan perjuangan hak buruh PT. AFI.

**BAB III**, pada bab ini hasil temuan penelitian diuraikan secara substantif dan terperinci. Deskripsi hasil temuan disajikan secara terorganisir berdasarkan permasalahan penelitian dan dipaparkan ke dalam beberapa Sub bab.

**BAB IV**, bab ini mendeskripsikan hasil analisis yang menghubungkan antara hasil temuan dengan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB V**, bab terakhir dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan penelitian secara ringkas, padat, dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah.

